

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh:

Probo Pribadi S.M

Universitas Simalungun

Alamat: JL. Sisingamangaraja Barat, Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (21142).

Korespondensi Penulis: probopribadi@gmail.com

***Abstract.** Pancasila as the state philosophy and ideology must be used as a guideline in law enforcement. The importance of absorption of constitutional values and quality education are also important factors for Indonesia to achieve the golden generation in 2045. This research examines realizing the golden generation of 2045 through equitable law enforcement based on Pancasila values associated with Development Law Theory and Justice Theory. This research is a type of normative research. The method used in this research is normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data as appropriate in legal research. The results of the study concluded that realizing the golden generation of 2045 through equitable law enforcement based on Pancasila values associated with Development Law Theory and Justice Theory can be done where Pancasila values must be the basis for realizing Indonesia's golden generation in 2045 where the protection of basic rights, equality of opportunity, and priority for disadvantaged groups, can be a guideline in realizing equitable law enforcement.*

***Keywords:** Pancasila Values, Fair Law Enforcement, Golden Generation 2045.*

Abstrak. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara harus dijadikan pedoman dalam penegakan hukum. Pentingnya penyerapan nilai-nilai konstitusi dan pendidikan

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

berkualitas juga menjadi faktor penting bagi Indonesia untuk mencapai generasi emas pada tahun 2045. Penelitian ini mengkaji mengenai mewujudkan generasi emas 2045 melalui penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai nilai pancasila dikaitkan dengan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Keadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mewujudkan generasi emas 2045 melalui penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai nilai pancasila dikaitkan dengan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Keadilan dapat dilakukan dimana Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 dimana adanya perlindungan hak-hak dasar, kesetaraan kesempatan, dan prioritas bagi kelompok kurang beruntung, dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Pancasila, Penegakan Hukum Berkeadilan, Generasi Emas 2045.

LATAR BELAKANG

Pancasila adalah dasar pemikiran dan paham yang sangat vital dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki beragam budaya, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menyatukan berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang ada di Indonesia.¹ Pancasila adalah fondasi utama dan sumber utama hukum di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dalam menyikapi perubahan zaman, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman seiring dengan kehidupan masyarakat Indonesia.² Ini berarti bahwa semua peraturan yang diatur harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dimana penerapan Pancasila yang dilakukan dengan baik dan tepat akan

¹Willy Putra Setiawan, "Pancasila Sebagai Landasan Berbangsa dan Bernegara", <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pancasila-sebagai-landasan-berbangsa-dan-bernegara/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024 Jam 00:04

²Eliza, K. M., Sari, S., Hellenia, S., Tianasati, F., & Hasan, Z. (2024). *Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Journal Of Law And Nation, 3(2), hlm. 342

membawa Indonesia menuju memiliki karakter bangsa yang kuat dan bersatu, tidak terpecah belah.³

Pancasila yang dikukuhkan sebagai dasar negara Indonesia berupa suatu ideologi atau cita-cita, konsep dan pandangan hidup yang harus dijadikan pedoman hidup oleh bangsa Indonesia sebagai sudut pandang dalam bermasyarakat dimana pancasila juga berisi pandangan, nilai, dan pemikiran yang menjadi pedoman dalam sikap, tingkah laku, dan tindakan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi rakyat Indonesia.⁴ Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mencakup nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan, kepedulian terhadap sesama manusia, persatuan dalam keberagaman, partisipasi dalam pemerintahan, dan kesetaraan sosial. Pancasila juga menjadi dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila adalah prinsip-prinsip yang mengatur cara berbangsa dan berkewarganegaraan. Hal tersebut mengatur cara pemerintah suatu negara beroperasi. Landasan Pancasila yang menjadi pijakan keberagaman agama dan kepercayaan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Pancasila juga memainkan peranan dalam mempersatukan keragaman di Indonesia. Pancasila telah menjadi komitmen yang disetujui sejak lama dalam Sumpah Pemuda dan menjadi bagian penting dalam kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Pancasila merupakan lambang dan ciri khas bangsa Indonesia yang menggabungkan keragaman suku, budaya, ras, dan agama di Indonesia menjadi satu kesatuan.⁶ Oleh karena itu, Pancasila memegang peranan yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Landasan Pancasila adalah landasan filosofis dan ideologis yang mengatur nilai-nilai, sikap, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pengikat keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia.⁷

³Willy Putra Setiawan, "Pancasila Sebagai Landasan Berbangsa dan Bernegara", Op.Cit

⁴Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. Jurnal Kewarganegaraan, 5(1), hlm.37

⁵Anronius Oberlin Gultom, "Pancasila Sebagai Fondasi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", <https://binus.ac.id/character-building/2020/03/pancasila-sebagai-fondasi-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024 Jam 00:15

⁶Shelvy Septiani Suhendar, "Pentingnya Pancasila Sebagai Fondasi Kehidupan Berbangsa", <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pentingnya-pancasila-sebagai-fondasi-kehidupan-berbangsa/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024 Jam 00:22

⁷Topan Yuniarto, "Pancasila dalam Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pancasila-dalam-dinamika-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024 Jam 00:31

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Pancasila memiliki prinsip-prinsip mulia yang menjadi pedoman utama dalam mencapai tujuan dari bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip mulia ini meliputi kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia, kesatuan bangsa Indonesia, pemerintahan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan, dan pemberian keadilan sosial kepada semua penduduk Indonesia. Implementasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila dilaksanakan dengan cara menyebarkannya ke berbagai aspek kehidupan, mengakomodasikannya dalam peraturan-peraturan yang berlaku, dan menafsirkan makna dari nilai-nilai Pancasila secara luas oleh pemerintah. Nilai-nilai mulia Pancasila sebagai landasan negara Indonesia, menjadi panduan utama dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai mulia tersebut tercatat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sebagai satu bangsa dan satu negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah merumuskan rencana visi dan misi yang dikenal dengan istilah “Visi Indonesia Unggul 2045”. Rencana masa depan ini adalah harapan yang tinggi bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju, adil, sejahtera, dan merdeka pada tahun 2045, tepat setelah 100 tahun merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu faktor utama adalah menciptakan generasi yang memiliki karakter Pancasila, integritas, kecerdasan, dan kualitas yang tinggi. Maksud tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 ialah meraih negara Indonesia yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Generasi muda saat ini memegang peran yang sangat krusial dalam memajukan masa depan Indonesia. Mereka akan menjadi pilar utama dalam melanjutkan perjuangan untuk mempertahankan dan memajukan negara ini. Agar menjadi generasi yang luar biasa, mereka perlu memiliki keunggulan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kecerdasan, etika, keagamaan, hubungan sosial, dan warisan budaya. Dalam pembentukan generasi emas, perlu difokuskan juga pada pengembangan kualitas moral dan spiritual.

Menerapkan sistem hukum yang adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah kunci dalam menciptakan generasi emas. Aturan hukum adalah alat utama dalam menciptakan kehidupan yang teratur, aman, dan adil bagi semua penduduk. Penegakan hukum yang adil tidak hanya memastikan keamanan dan keselamatan, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial untuk semua

warga Indonesia. Generasi muda perlu menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan ideologi Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menegakkan hukum yang adil sangatlah penting dalam mencapai visi generasi emas 2045, karena hal itu akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan generasi muda. Generasi muda perlu dibesarkan dan berkembang di lingkungan yang aman, teratur, dan adil, agar mereka bisa mengeluarkan potensi mereka sebaik mungkin tanpa merasa cemas atau terkekang. Penegakan hukum yang adil juga akan memastikan hak-hak dasar mereka terlindungi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak. Pendidikan yang berkualitas dan peran orang tua yang baik juga akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda.⁸

Menegakkan hukum dengan adil sangat berperan dalam memberikan contoh dan pendidikan bagi anak muda tentang betapa vitalnya menjunjung tinggi keadilan dan menghargai hukum. Generasi muda akan menyaksikan penerapan hukum yang adil tanpa memperhatikan kedudukan sosial, kekayaan, atau kekuasaan seseorang. Hal ini akan mendorong mereka untuk berkembang sebagai anggota masyarakat yang patuh pada hukum dan bertekad untuk memastikan keadilan di masa depan. Dalam situasi ini, lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan memiliki peran yang sangat krusial dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dimana lembaga-lembaga ini wajib memperlihatkan kesetiaan dan kemampuan kerja yang terampil serta memegang teguh nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran dalam segala proses penerapan hukum yang dilakukan.⁹

Menegakkan hukum membutuhkan integritas dan profesionalisme yang sangat penting. Aparat penegak hukum berperilaku jujur, mereka tidak memihak dan tidak memandang suku, ras, agama, atau status sosial seseorang. Menjaga prinsip-prinsip dasar keadilan adalah hal yang sangat vital, karena hal tersebut merupakan dasar dari hukum yang adil. Untuk mencapai penerapan hukum yang adil, perlu dilakukan upaya untuk

⁸Zainuddin Lubis, "3 Tantangan Besar Orang Muda Menuju Indonesia Emas 2045", <https://nu.or.id/opini/3-tantangan-besar-orang-muda-menuju-indonesia-emas-2045-zmc2S>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024 Jam 01:19

⁹Annisa, "Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya", <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024 Jam 10:24

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

memperkuat sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Hal ini mencakup penyempurnaan peraturan hukum, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta penguatan infrastruktur dan fasilitas hukum dan peradilan. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara efisien, efektif, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan generasi emas 2045, penegakan hukum yang adil juga perlu memperhatikan aspek pendidikan dan pembinaan moral generasi muda. Pendidikan hukum dan nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam kurikulum mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. Tujuannya untuk menanamkan kesadaran hukum dan nilai moral yang kuat pada generasi muda sejak dini, sehingga menjadi warga negara yang taat hukum dan berkarakter pancasila. Pendidikan karakter merupakan salah satu aspek yang penting dalam pendidikan generasi emas.¹⁰

Untuk mewujudkan generasi emas 2045, perlu memperhatikan aspek pendidikan dan moral bagi generasi muda. Pendidikan hukum dan nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam kurikulum mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. Guru mempunyai peran penting dalam mewujudkan pendidikan generasi emas, baik sebagai penggerak utama transformasi misi pendidikan maupun sebagai teladan yang patut ditiru. Selain itu, pentingnya penyerapan nilai-nilai konstitusi dan pendidikan berkualitas juga menjadi faktor penting bagi Indonesia untuk mencapai generasi emas pada tahun 2045.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang mewujudkan generasi emas 2045 melalui penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai nilai pancasila dikaitkan dengan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Keadilan. Maka dari itu, Penulis ingin membahas dalam artikel ini dan tertarik mengambil judul penelitian mewujudkan generasi emas 2045 melalui penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai pancasila.

¹⁰Kemdikbud, "Generasi Pelajar Pancasila Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045", <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/09/generasi-pelajar-pancasila-kunci-wujudkan-indonesia-emas-2045>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024 Jam 17:24

¹¹ibid

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif holistik, data yang digunakan hanya sebagai suplemen penelitian. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.¹² Semua data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila merupakan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua kata, yaitu “panca” yang berarti lima, dan “sila” yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berperan penting dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai kebangsaan dan menguatkan kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain ketuhanan, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi dan keadilan .

Sebagai pedoman hidup, Pancasila merupakan visi filosofis yang memuat nilai-nilai etika, moral, dan sosial sebagai pedoman hidup setiap individu Indonesia dan masyarakat. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia terdiri dari lima prinsip atau sila dasar yang menyatakan nilai-nilai dasar yang harus dianut oleh seluruh warga negara Indonesia. Terdapat lima sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu, antara lain:¹³

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini menekankan pentingnya kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini juga menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia;

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

¹²Bambang Sunggono, 2002, Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 194-195

¹³Hukumonline,”Arti Pancasila bagi Bangsa Indonesia dan Makna Lima Silanya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pancasila-sebagai-dasar-negara-1t61f23142a7e13/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 17 Juni 2024 Jam 19:24

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Sila kedua ini mengajarkan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesopanan dalam berinteraksi dengan sesama manusia;

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ini mendorong rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat ini menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pemerintah. Sila ini juga menekankan perlunya kebijaksanaan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan; dan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat. Sila ini mendorong distribusi yang adil dan merata terhadap sumber daya dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila mempunyai sejumlah fungsi dan makna penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain:

1. Dasar Negara

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi representasi warga negara dan tujuan dalam negara. Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa yang disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.¹⁴

2. Pandangan Hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup yang menjadi pedoman setiap individu untuk hidup dengan nilai-nilai luhur. Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sikap maupun perilaku yang ingin ditanamkan.¹⁵

3. Pemersatu Bangsa

¹⁴Ibid

¹⁵Anugrah Dwi, "Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara", <https://fkip.umsu.ac.id/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-dan-dasar-negara/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 17 Juni 2024 Jam 22:07

Pancasila memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Pancasila merupakan pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkokoh jati diri bangsa Indonesia.¹⁶

4. Sumber ketertiban hukum

Pancasila merupakan sumber ketertiban hukum Indonesia. Pokok-pokok tatanan hukum Indonesia meliputi pandangan hidup, hati nurani, cita-cita hukum dan moral, termasuk suasana kejiwaan dan watak masyarakat Indonesia.¹⁷

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang secara resmi ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menempati posisi khusus dalam sistem hukum dan struktur pemerintahan Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat. Segala tatanan kehidupan bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut.¹⁸

Pancasila juga diakui sebagai ideologi negara dan landasan utama penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai dua peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, Pancasila memberikan arah kebijakan pemerintah dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁹

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup masyarakat Indonesia juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya saja dalam undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

¹⁶CNN Indonesia, "Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara bagi Bangsa Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230523162021-569-953037/fungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara-bagi-bangsa-indonesia>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 17 Juni 2024 Jam 22:17

¹⁷CNN Indonesia, "Pengertian dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230406095301-569-934310/pengertian-dan-fungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara-indonesia>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 17 Juni 2024 Jam 22:17

¹⁸Hukumonline, Arti Pancasila bagi Bangsa Indonesia dan Makna Lima Silanya, Op. Cit

¹⁹Budgetnesia, "Pancasila Sebagai Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kenegaraan Merupakan Fungsi Pancasila Sebagai Apa?", <https://www.budgetnesia.com/pancasila-sebagai-landasan-penyelenggaraan-pemerintahan-dan-kenegaraan-merupakan-fungsi-pancasila-sebagai-apa/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 17 Juni 2024 Jam 22:38

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa setiap unsur peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengatur bahwa pembangunan nasional Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan landasan seluruh proses pembangunan nasional di Indonesia.

Di bidang pendidikan, Pancasila juga menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan, membentuk jati diri dan peradaban bangsa, menciptakan kehidupan bangsa yang berkeadaban, guna mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berkemanusiaan serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia. Nilai-nilai seperti demokrasi yang dipimpin oleh intelijen dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi landasan dalam penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Simbol Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam undang-undang tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai salah satu simbol negara yang wajib dihormati dan dilestarikan. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila menduduki kedudukan yang sangat penting dan mendasar sebagai landasan negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila terlibat dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dan menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara sistematis merupakan kunci untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, berkeadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Mewujudkan generasi emas 2045 melalui penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dikaitkan dengan Teori Hukum Pembangunan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Teori Hukum Pembangunan adalah teori hukum yang diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Teori ini berasumsi bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan sistem yang diperlukan bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Teori Hukum Pembangunan ini menggunakan kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang didasari atas asas Pancasila. Teori ini juga memberikan landasan bagi fungsi hukum sebagai sarana reformasi sosial. Hukum harus mampu berkontribusi terhadap perubahan sosial, bukan sekadar mempertahankan status *quo*.²⁰

Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja merupakan sebuah konsep yang menekankan pada peran hukum dalam memajukan pembangunan masyarakat. Teori ini mengemukakan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penerapannya, antara lain:

1. Hukum tertulis sebagai akselerator pembangunan²¹

Teori ini mengkaji bagaimana hukum dapat lebih mendorong pembangunan masyarakat. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menganut pendekatan hukum yurisprudensi;

2. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat²²

Teori Hukum Pembangunan menekankan bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam inovasi sosial;

3. Penggunaan Hukum sebagai Alat Pembangunan²³

²⁰Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LLM", https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs/Tabs_Group_name:tabLampiran, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 18 Juni 2024 Jam 00:38

²¹Ferinda K Fachri, "Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/?page=all>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Selasa 18 Juni 2024 Jam 09:27

²²Ibid

²³Perpustakaan Lemhannas RI, "Teori Hukum Pembangunan", <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000141/swf/3875/files/basic-html/page7.html>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Selasa 18 Juni 2024 Jam 14:07

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Hukum harus diberdayakan untuk memandu perubahan dan pembangunan, sehingga dapat menjadi instrumen atau wahana pembangunan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya menjaga ketertiban sosial tetapi juga turut andil dalam proses perubahan sosial;

4. Pengembangan Norma, Asas, Lembaga, dan Kaidah²⁴

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menggunakan kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada prinsip Pancasila. Norma, prinsip, lembaga, dan aturan yang terkandung dalam teori ini merupakan aspek relatif yang mencakup struktur, proses, dan hasil; dan

5. Penguatan Penegakan Hukum²⁵

Penguatan penegakan hukum perlu dilakukan melalui penguatan independensi peradilan dan reformasi institusi penegakan hukum melalui teknologi informasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan masyarakat.

Generasi muda merupakan bagian dari langkah penting menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Generasi muda berperan penting dalam mempersiapkan negara menghadapi masa depan dan harus memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila.²⁶ Generasi muda sebagai generasi emas diharapkan mampu menjadikan Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, dan bermartabat. Kunci utama dalam mencapai Generasi Emas 2045 hanyalah penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan landasan utama pembangunan hukum dan pemeliharaan keadilan di Indonesia.

Mewujudkan generasi emas tahun 2045 merupakan visi yang akan memudahkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut, penerapan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Pancasila, dasar ideologi negara Indonesia, mengandung nilai-nilai universal yang menjadi perhatian seluruh masyarakat. Lima prinsipnya mencerminkan prinsip-prinsip yang mendalam dan universal dimana nilai-nilai agama dan keyakinan, kebangsaan dan

²⁴ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit

²⁵ Yuliandri, "Konsistensi Negara Hukum Menuju Indonesia Emas 2045 (Pokok-Pokok Pikiran untuk Penajaman Rancangan RPJPN 2025-2045)", <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/499-unand-bappenas-rektor-rpjpn.html>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Selasa 18 Juni 2024 Jam 14:09

²⁶ Kemdikbud, "Generasi Pelajar Pancasila Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045", <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/09/generasi-pelajar-pancasila-kunci-wujudkan-indonesia-emas-2045>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Selasa 18 Juni 2024 Jam 15:46

kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi landasan Indonesia tetapi juga memberikan pembelajaran dan solusi berharga.

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” menekankan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan manusia. Prinsip ini tidak hanya mengakui keberadaan Tuhan, namun secara implisit juga menghormati perbedaan keyakinan dan agama yang dilindungi dan dianut setiap orang. Nilai sakral ini dipersatukan dan diperkuat oleh sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana nilai-nilai kemanusiaan harus ditetapkan dan ditempatkan secara adil dan beradab, sehingga setiap orang mempunyai ruang dan kebebasan untuk mengikuti dan mempercayai.

Sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu agar bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya dan Tuhan menciptakannya dengan kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras atau keturunannya. Nilai kemanusiaan ini diungkapkan melalui keteladanan seperti mengakui adanya harkat dan martabat manusia, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan Tuhan, dan bersikap adil terhadap orang lain. Arti dari sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia” adalah penyatuan seutuhnya berbagai aspek kehidupan, baik dari segi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, yang dicapai dalam satu wilayah bernama Indonesia. Nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan setiap hari melalui sikap dan perilaku seperti mengutamakan solidaritas, persatuan, kepentingan dan keamanan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kolektif.

Sila keempat nilai-nilai Pancasila adalah nilai kemasyarakatan, bangsa Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Berikut penerapan nilai-nilai umum Pancasila, antara lain:

1. Mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat.
2. Mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
3. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan.

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

4. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
5. Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

Nilai Pancasila sila ke-5 adalah nilai keadilan sosial, yang menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan beradab. Nilai keadilan sosial ini tercermin dalam contoh-contoh seperti mengakui hak setiap individu, mengakui keberadaan individu sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan, dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Bagi Indonesia dan dunia, Pancasila adalah mercusuar harapan dan pedoman menuju masa depan yang lebih damai dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045, penegakan hukum yang berkeadilan juga harus memperhatikan aspek pembangunan manusia secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Penegakan hukum harus mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Generasi emas tahun 2045 tidak hanya ditandai dengan kemajuan ekonomi dan teknologi, namun juga tercapainya masyarakat adil, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, penegakan hukum yang adil juga harus memperhatikan nilai-nilai solidaritas Indonesia. Keadilan hukum harus mampu mempersatukan seluruh lapisan bangsa, tanpa memandang asal usul suku, agama, ras, dan golongan. Penerapan hukum yang diskriminatif dan tidak adil hanya akan menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat, yang justru dapat menghambat terwujudnya generasi emas 2045.

Mewujudkan generasi emas 2045 melalui penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai pancasila dikaitkan dengan Teori Keadilan

Teori keadilan John Rawls merupakan teori yang menitikberatkan pada konsep keadilan sebagai fairness atau keadilan prosedural. Rawls membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:²⁷

1. Prinsip keadilan yang pertama

²⁷Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/viewFile/1589/1324>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Selasa 18 Juni 2024 Jam 15:50

Setiap orang berhak, atas dasar kesetaraan, atas kebebasan-kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sepadan dengan kebebasan-kebebasan lainnya. Prinsip ini berlaku pada struktur dasar masyarakat dan fokus pada perlindungan hak asasi manusia.

2. Prinsip keadilan yang kedua

Perbedaan sosial agama dan ekonomi harus disesuaikan sehingga bermanfaat bagi semua orang dan dapat mewujudkan kedudukan, kedudukan dan ruang yang terbuka bagi semua orang. Prinsip ini juga berlaku pada struktur dasar masyarakat dan menitikberatkan pada distribusi manfaat sosial.

Jhon Rawls berpendapat bahwa struktur masyarakat yang ideal dan adil adalah struktur dasar asli masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, wewenang, kesempatan, pendapatan, dan kebahagiaan. Struktur masyarakat ini digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi sosial yang ada saat ini dimana adil atau tidak. Dalam konsepsi Jhon Rawls, keadilan sosial dapat dicapai dengan perbaikan struktur dasar lembaga-lembaga sosial utama seperti pengadilan, pasar, dan konstitusi negara. Menurut John Rawls demokrasi konstitusional yang dicapai melalui adanya badan perwakilan yang anggotanya dipilih secara adil.²⁸

Teori keadilan Jhon Rawls mengambil posisi sebagai berikut:

1. Menekankan perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan Pribadi

Teori Rawls menekankan bahwa semua individu harus menikmati kebebasan dasar yang sama;

2. Mengutamakan kepentingan kelompok yang kurang beruntung

Prinsip perbedaan dalam teori Rawls menekankan bahwa kesenjangan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling dirugikan;

3. Menekankan prinsip keadilan prosedural

Teori Rawls menekankan pentingnya proses yang adil dan transparan untuk terciptanya keadilan;

4. Mendukung prinsip kesetaraan kesempatan

Teori Rawls mendukung prinsip kesetaraan kesempatan, yang menyatakan bahwa semua posisi dan posisi harus terbuka untuk semua;

²⁸Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice), Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, pp. 135-149, 2009, hlm. 145

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Dalam konteks mewujudkan generasi emas Indonesia 2045, teori keadilan John Rawls dapat menjadi pedoman bagi penegakan hukum yang adil. Prinsip-prinsip keadilan yang ditekankan Rawls, seperti pengakuan hak-hak politik warga negara, persamaan tugas, dan kebebasan yang dibatasi oleh konstitusi yang adil, dapat menjadi dasar untuk membangun sistem hukum yang adil. Keadilan mensyaratkan agar seluruh anggota masyarakat bersedia memikul beban kewajiban dan tanggung jawab yang sama serta mematuhi konstitusi yang berlaku. Kesetaraan tersebut merujuk pada keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Dalam konteks ini, penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terwujudnya generasi emas 2045, teori keadilan John Rawls terjadi apabila :

1. Terjaminnya kebebasan dan hak-hak dasar bagi setiap warga negara, termasuk generasi muda, tanpa diskriminasi.
2. Akses yang sama bagi semua warga negara terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
3. Adanya perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
4. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan, sehingga tidak ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang terlalu besar.
5. Proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, serta menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan musyawarah.

Dengan penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan sejalan dengan teori keadilan John Rawls, generasi muda Indonesia akan tumbuh dalam lingkungan yang kondusif, dengan perlindungan hak-hak dasar, akses yang sama terhadap keadilan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Hal ini akan membantu mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 yang berkarakter kuat, cerdas, dan mampu membawa kemajuan bagi bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bedasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045, termasuk penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menekankan pentingnya peran hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat. Dalam konteks generasi emas 2045, hukum harus mampu berkontribusi terhadap perubahan sosial dan menjadi instrumen pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
3. Teori Keadilan John Rawls yang menekankan pada perlindungan hak-hak dasar, kesetaraan kesempatan, dan prioritas bagi kelompok kurang beruntung, dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sesuai nilai-nilai Pancasila untuk mencapai generasi emas Indonesia 2045.

Saran

Bedasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan terkait mewujudkan generasi emas 2045 melalui penegakan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah:

1. Meningkatkan pendidikan dan sosialisasi terkait Pancasila secara luas dan berkelanjutan untuk memajukan generasi muda sejak dini melalui program pendidikan formal dan nonformal. Tentang penanaman pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Melakukan reformasi dan penyempurnaan sistem hukum dan peradilan di Indonesia agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip Pancasila. Termasuk memperkuat kapasitas dan integritas aparat penegak hukum.
3. Mengoptimalkan penerapan hukum secara adil dan tidak diskriminatif, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila.

4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 yang beridentitas Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, "Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan Fungsinya", <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024
- Anugrah Dwi, "Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara", <https://fkip.umsu.ac.id/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-dan-dasar-negara/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 17 Juni 2024
- Bambang Sunggono, 2002, "Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 194-195
- Budgetnesia, "Pancasila Sebagai Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kenegaraan Merupakan Fungsi Pancasila Sebagai Apa?", <https://www.budgetnesia.com/pancasila-sebagai-landasan-penyelenggaraan-pemerintahan-dan-kenegaraan-merupakan-fungsi-pancasila-sebagai-apa/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 17 Juni 2024
- CNN Indonesia, "Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara bagi Bangsa Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230523162021-569-953037/fungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara-bagi-bangsa-indonesia>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 17 Juni 2024
- CNN Indonesia, "Pengertian dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230406095301-569-934310/pengertian-dan-fungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara-indonesia>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 17 Juni 2024
- Eliza, K. M., Sari, S., Hellenia, S., Tianasati, F., & Hasan, Z. (2024). "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi". *Journal Of Law And Nation*, 3(2),

- Fachri, Ferinda K. "Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/?page=all>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Selasa 18 Juni 2024 Jam 09:27
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls", <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/viewFile/1589/1324>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Selasa 18 Juni 2024
- Hukumonline, "Arti Pancasila bagi Bangsa Indonesia dan Makna Lima Silanya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pancasila-sebagai-dasar-negara-lt61f23142a7e13/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 17 Juni 2024
- Kemdikbud, "Generasi Pelajar Pancasila Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045", <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/09/generasi-pelajar-pancasila-kunci-wujudkan-indonesia-emas-2045>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024
- Kemdikbud, "Generasi Pelajar Pancasila Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045", <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/09/generasi-pelajar-pancasila-kunci-wujudkan-indonesia-emas-2045>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Selasa 18 Juni 2024
- Lubis, Zainuddin "3 Tantangan Besar Orang Muda Menuju Indonesia Emas 2045", <https://nu.or.id/opini/3-tantangan-besar-orang-muda-menuju-indonesia-emas-2045-zmc2S>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LLM", https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran, diakses di Pematangsiantar Pada hari Senin 18 Juni 2024
- Mohamad Faiz, Pan "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls Theory of Justice)", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, pp. 135-149, 2009, hlm. 145
- Oberlin Gultom, Anronius. "Pancasila Sebagai Fondasi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", <https://binus.ac.id/character-building/2020/03/pancasila-sebagai-fondasi-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024

MEWUJUDKAN GENERASI EMAS 2045 MELALUI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Perpustakaan Lemhannas RI, “Teori Hukum Pembangunan”, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000141/swf/3875/files/basic-html/page7.html>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Selasa 18 Juni 2024

Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). “Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi”. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1)

Setiawan, Willy Putra.”Pancasila Sebagai Landasan Berbangsa dan Bernegara”, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pancasila-sebagai-landasan-berbangsa-dan-bernegara/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024

Septiani Suhendar, Shelvy.”Pentingnya Pancasila Sebagai Fondasi Kehidupan Berbangsa”, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/pentingnya-pancasila-sebagai-fondasi-kehidupan-berbangsa/>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024

Yuniarto, Topan ”Pancasila dalam Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pancasila-dalam-dinamika-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Minggu 16 Juni 2024

Yuliandri, “Konsistensi Negara Hukum Menuju Indonesia Emas 2045 (Pokok-Pokok Pikiran untuk Penajaman Rancangan RPJPN 2025-2045)”, <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/499-unand-bappenas-rektor-rpjp.html>, diakses di Pematangsiantar Pada hari Selasa 18 Juni 2024